

KELITBANGAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA SEMARANG

Prihadi Nugroho*, Samsul Ma'rif, Novita Rohmana Putri

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedharto, SH, Semarang, 50275, Indonesia

Jurnal Riptek

Volume 15 No. 2 (60–68)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 27 Oktober 2021

Direvisi: 13 November 2021

Disetujui: 29 November 2021

Tersedia online: 31 Desember 2021

Kata Kunci:

Pembangunan Ekonomi, Evidence based policy, Kelitbangan

Korespondensi penulis:

*prihadi.nugroho@live.undip.ac.id

Abstract. Misi pembangunan bidang ekonomi Kota Semarang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan riset dan inovasi. Hal ini selaras dengan paradigma pembangunan ekonomi yang saat ini telah berorientasi pada *knowledge-based economy* yaitu pengetahuan dan budaya inovasi menjadi motor penggerak perekonomian. Dalam pencapaian misi pembangunan bidang ekonomi, Kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan di antaranya berupa penurunan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dari 6,89% pada tahun 2019 menjadi minus 1,61% pada tahun 2020 dan pencapaian indeks daya saing daerah (IDSD) yang tidak signifikan. Selain itu, akibat pandemi Covid-19, perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat terganggunya aktivitas-aktivitas ekonomi sejumlah sektor usaha. Kesenjangan (*gap*) antara hasil kinerja pada aspek ekonomi dan apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah lewat berbagai standar capaian yang ditetapkan menyebabkan munculnya permasalahan dalam mencapai misi pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan kelitbangan dibutuhkan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja pembangunan ekonomi Kota Semarang ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian strategis kelitbangan yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara penelitian menuju kebijakan (*bridging research to policy*) serta menjadi upaya implementasi kebijakan berbasis bukti *evidence based policy* dalam pemerintahan Kota Semarang. Secara spesifik, kajian ini disusun dengan tujuan untuk menyusun arahan kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi yang mendorong pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Kajian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Kajian menghasilkan 49 usulan tema kelitbangan dengan jenis kegiatan berupa penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Kajian ini memiliki temuan bahwa dalam penyusunan usulan judul tema kelitbangan perlu memerhatikan indikator kinerja dan prioritas program yang mendukung tiap sasaran rencana pembangunan. Hal ini berkaitan dengan upaya agar tema kelitbangan yang diusulkan tepat sasaran dalam pencapaian indikator kinerja dalam misi bidang ekonomi.

Cara mengutip:

Nugroho, P; Ma'rif, S; Putri, NR. 2021. Kelitbangan dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang. **Jurnal Riptek**. Vol. 15 (2): 60-68.

PENDAHULUAN

Misi pembangunan Kota Semarang dalam bidang ekonomi tercantum dalam misi ke-2 Rancangan Akhir Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RA-RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026, yaitu "Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila". Dalam misi tersebut menyebutkan bahwa Kota Semarang melakukan pembangunan ekonomi berdasarkan riset dan inovasi. Hal ini selaras dengan paradigma pembangunan ekonomi yang saat ini telah berorientasi pada *knowledge-based economy* yaitu pengetahuan dan budaya inovasi menjadi motor penggerak perekonomian. *Knowledge-based economy* menekankan bahwa ekonomi bernilai tambah tinggi karena adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

inovasi (OECD, 1996). Dalam pencapaian misi bidang ekonomi, terdapat dua sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) meningkatnya produk unggulan daerah dan (2) meningkatnya nilai tambah ekonomi. Menurut Blakely dan Bradshaw (2002), identifikasi produk unggulan merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Identifikasi potensi ekonomi lokal berkaitan dengan penentuan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian lokal tumbuh pesat (Tarigan, 2009).

Mengacu pada sasaran pembangunan yang ingin dicapai, aspek utama dalam daya saing perkotaan adalah kekhasan lokal yang diwujudkan dengan pengembangan lokal melalui produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk dari daerah lain (Kwon et al., 2012). Maka dari itu, tingkat

produktivitas komoditas perlu diperhatikan dalam hal peningkatan daya saing kota. Permasalahan terkait produk unggulan daerah memiliki keterkaitan erat dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi sebagai peluang ekonomi baru dan pembuka lapangan kerja bagi perekonomian Kota Semarang. Jumlah UMKM di Kota Semarang hingga tahun 2019 mencapai 17.567 unit yang bergerak pada subsektor atau komoditas yang beragam. Meski demikian, kontribusi sektor UMKM masih memiliki kontribusi yang kecil terhadap perekonomian Kota Semarang, sehingga pembinaan UMKM menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas UMKM di Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang sebagai ibukota provinsi memiliki keuntungan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional pada setiap tahunnya. Pengoptimalan dalam pengembangan konsep wisata *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) wajib dilakukan mengingat penerapan konsep ini dapat menjadi keunggulan tersendiri. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD Kota Semarang sebesar Rp 1,1 triliun akibat melemahnya sektor wisata. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan 14,92%. Hal ini juga memberikan dampak turunan berupa penurunan okupansi hotel sebesar 20%. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal meskipun potensinya sangat besar. Industri kreatif atau ekonomi kreatif menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tidak terbatas, yaitu kreativitas untuk menciptakan nilai tambah (Lestariningsih, Maharani, & Lestari, 2019).

Kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi, di antaranya berupa penurunan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dari 6,89% pada tahun 2019 menjadi minus 1,61% pada tahun 2020 dan pencapaian indeks daya saing daerah (IDSD) yang tidak signifikan. Padahal, pembangunan ekonomi perkotaan salah satunya ditentukan oleh bagaimana suatu kota memiliki daya saing, terutama daya saing berkelanjutan (Borsekova et al., 2012). Selain itu, akibat pandemi Covid-19, perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat terganggunya aktivitas-aktivitas ekonomi sejumlah sektor usaha. Mengacu pada permasalahan tersebut diperlukan pembangunan yang berfokus baik terhadap pertumbuhan maupun pemerataan sehingga keduanya dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif (Juliana et al., 2018).

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sangat memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi setiap daerah yang beragam melatarbelakangi perlunya perencanaan ekonomi yang berbeda setiap daerah (ILO, 2005; Nijkamp & Abreu, 2009). Dalam perencanaan pembangunan, kelitbangan menjadi rujukan perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dan rencana pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan. Dalam setiap program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja. Kesenjangan (gap) antara hasil kinerja pada aspek ekonomi dan apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah lewat berbagai standar capaian yang ditetapkan menyebabkan munculnya permasalahan dalam mencapai misi pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan kelitbangan dibutuhkan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja pembangunan ekonomi Kota Semarang ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kajian strategis kelitbangan diharapkan dapat menjadi jembatan antara penelitian menuju kebijakan (*bridging research to policy*) serta menjadi upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam pemerintahan Kota Semarang. *Evidence-based policy* dapat didefinisikan sebagai kebijakan publik berdasarkan bukti objektif. *Evidence-based policy* berupaya meminimalkan pengaruh ideologis dan politik dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik (Sutcliffe & Court, 2005).

Kajian strategis kelitbangan diperlukan untuk mendukung percepatan pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi tujuan penyelesaian permasalahan aktual (substansif) dan ketentuan tertib administratif tata laksana perencanaan pembangunan daerah sesuai Permendagri (normatif). Selain itu, melalui kajian strategis kelitbangan dapat dipastikan tersusunnya kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara spesifik, kajian ini disusun dengan tujuan untuk menyusun arahan kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi yang mendorong pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

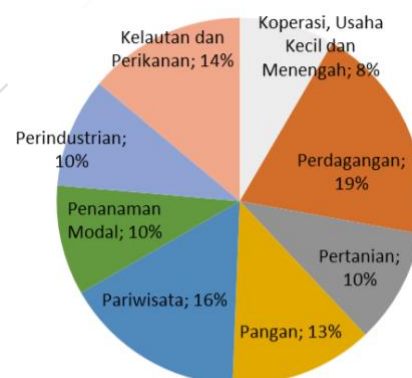
METODE ANALISIS

Kajian ini menggunakan pendekatan metode penelitian campuran (*mixed method*). Pendekatan metode penelitian *mixed method* menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell, 2009). Analisis Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Ekonomi Kota Semarang tahun 2021-2026 terbagi menjadi empat langkah utama. Pertama yaitu melakukan analisis konten dan analisis komparasi deskriptif untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) antara rencana pembangunan tahun 2021-2026 dan penelitian dan pengembangan yang sudah terlaksana tahun 2016-2021. Selanjutnya dilakukan analisis pemetaan, yaitu tiap-tiap sumber data tersebut diklasifikasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan, kemudian penelitian dikelompokkan ke tiap-tiap sasaran pembangunan sebagai data pendukung. Hasil dari analisis tersebut terlihat sasaran pembangunan yang ada data, kurang, atau tidak ada data penelitian dan pengembangan yang mendukung. Hasil analisis *gap* sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan penelitian beserta penyusunan usulan penelitian dan pengembangan untuk tahun 2021-2026. Kebutuhan penelitian tersebut dapat bersifat penelitian baru maupun penelitian untuk mengisi *gap*. Hasil analisis kebutuhan penelitian ini terbentuk daftar panjang usulan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis prioritas untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut, atau disebut sebagai *roadmap*. Penyusunan *roadmap* memiliki maksud untuk pengalokasian sumber daya (UK Government, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

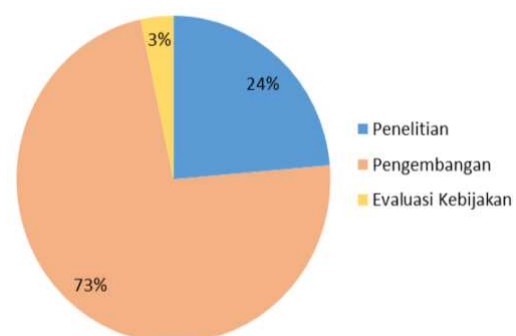
Kegiatan Kelitbangan 2016-2021. Penyusunan kebutuhan penelitian untuk periode pembangunan 2021-2026 turut memperhatikan kondisi terkini penelitian dan pengembangan Kota Semarang khususnya di bidang ekonomi. Kondisi yang dimaksud adalah kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda sebagai lembaga *think tank* di pemerintah daerah maupun organisasi pemerintah daerah (OPD) Kota Semarang pada periode pembangunan sebelumnya yaitu periode 2016-2021. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan kelitbangan yang telah terlaksana dan yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. Selain itu juga diharapkan hasil dari kajian ini dapat efektif dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Semarang, dengan cara memetakan penelitian terdahulu berdasarkan bidang urusan pemerintahan.

Pada periode pembangunan 2016-2021, telah terlaksana 237 kegiatan kelitbangan yang terdiri dari 56 kegiatan penelitian, 173 kegiatan pengembangan, dan 8 kegiatan evaluasi kebijakan. Bidang urusan dengan pelaksanaan kelitbangan terbanyak yaitu urusan perdagangan dengan 20 penelitian, 25 pengembangan, dan 1 evaluasi kebijakan, sehingga total mencapai 46 data kegiatan kelitbangan yang terkumpul hingga tahun 2021. Urusan terbanyak kedua yaitu urusan pariwisata dengan 14 penelitian dan 24 pengembangan. Urusan dengan jumlah data kelitbangan paling sedikit yang dilakukan hingga tahun 2021 yaitu urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan total 20 kegiatan kelitbangan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan kelitbangan berdasarkan jenis kelitbangan paling banyak adalah kegiatan pengembangan dengan persentase 73%. Kemudian kegiatan penelitian dengan persentase 24%, lalu evaluasi kebijakan merupakan kegiatan paling sedikit dengan persentase 3%. Persentase pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Gambar 1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan 2016-2021 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

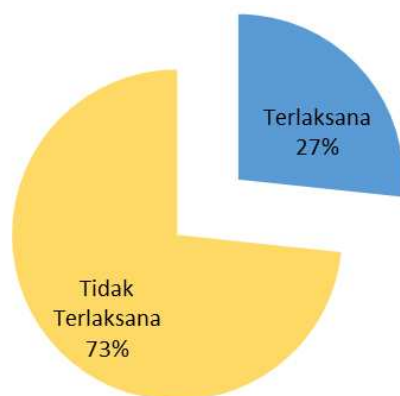


(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Gambar 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan 2016-2021 Berdasarkan Jenis Kelitbangan

Evaluasi Usulan Kelitbangan 2016-2021. Pada periode pemerintahan 2016-2021, telah disusun pula kegiatan Kajian Strategis Kelitbangan 2016-2021 sebagai upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang ekonomi selama periode tersebut. Dalam bidang ekonomi terdapat 30 usulan judul yang terbagi menjadi penelitian dan pengembangan yang terbagi ke dalam masing-masing bidang urusan ekonomi. Penanggung jawab kegiatan kelitbangan meliputi seluruh OPD yang membawahi urusan bidang ekonomi dan Bappeda.

Terdapat 8 bidang urusan yang memiliki usulan judul penelitian dan pengembangan, meliputi urusan pertanian, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, koperasi usaha kecil dan menengah, keuangan, dan kelautan dan perikanan. Bidang urusan perindustrian menjadi satu-satunya urusan yang tidak memiliki usulan judul. Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar usulan tidak terlaksana. Dari 30 usulan judul penelitian dan pengembangan, hanya 8 usulan atau 27% usulan yang terlaksana.



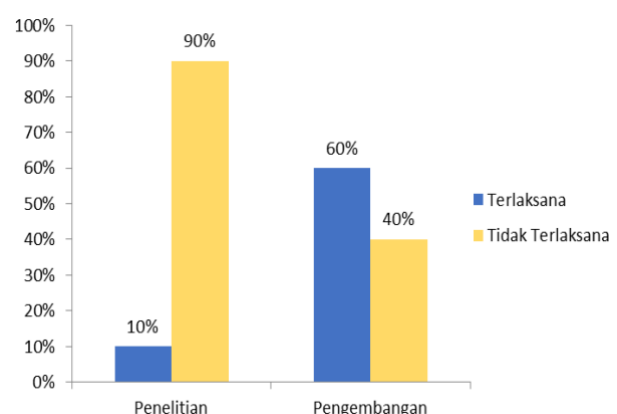
(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan 2016-2021

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelitbangan, pelaksanaan jenis pengembangan memiliki tingkat pelaksanaan lebih tinggi dibanding jenis penelitian. Usulan judul penelitian yang terlaksana hanya 10%, sedangkan usulan judul pengembangan yang terlaksana adalah 60% (Gambar 4).

Berdasarkan evaluasi kegiatan kelitbangan yang dilakukan, terdapat 237 kegiatan kelitbangan pada tahun 2016-2020, sedangkan dari 30 usulan judul ternyata hanya ada 8 usulan atau 27% usulan yang terlaksana. Rendahnya realisasi pelaksanaan usulan

judul kelitbangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak OPD terkait, rendahnya pelaksanaan usulan kegiatan kelitbangan disebabkan oleh ketidaktahuan OPD terkait akan adanya rujukan usulan kelitbangan. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya keterbatasan anggaran dan adanya prioritas program lain yang mereka kerjakan. Mengacu pada alasan-alasan tersebut, maka koordinasi antara Litbang Bappeda dan OPD penanggung jawab kegiatan kelitbangan perlu ditingkatkan. Selain itu, penting untuk melibatkan OPD terkait dalam proses penyusunan kajian kelitbangan secara holistik.



(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Gambar 4. Perbandingan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2021-2026. Arah pembangunan bidang ekonomi Kota Semarang tahun 2021-2026 tercantum dalam RA-RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Dalam perencanaan pembangunan, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena akan berpengaruh langsung terhadap visi – misi dan tujuan – sasaran yang akan ditetapkan pada tahap selanjutnya. Dalam perumusan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RA-RPJMD, permasalahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah produktivitas dan daya saing potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan (Tabel 1).

Sementara itu, isu strategis bidang ekonomi terbagi menjadi dua kelompok isu strategis yaitu (1) Pengembangan potensi ekonomi kreatif serta peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM dan (2) Peningkatan daya saing kota (Tabel 2).

Tabel 1. Permasalahan Bidang Ekonomi

Masalah	Akar Permasalahan
1. Produktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan	Kinerja investasi belum optimal Produktivitas dan daya saing produk belum optimal
2. Pengembangan ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan	Daya saing wisata masih perlu ditingkatkan Kapasitas dan kualitas UMKM masih belum optimal Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan
3. Ketersediaan dan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	Pemanfaatan sumber daya pangan oleh masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan belum optimal

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Tabel 2. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Isu Strategis	Kelompok Isu	Gagasan Awal Tema Kelitbangan
Pengembangan potensi ekonomi kreatif serta peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM	Pengembangan ekonomi kreatif Kota Semarang	- Pengembangan creative hub - Pengembangan wisata MICE - Pengembangan subsektor ekonomi kreatif unggulan
	Peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM	- Akses pelayanan keuangan - Peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM - Strategi pemasaran online
Peningkatan daya saing kota	Daya saing pariwisata	Pengembangan sektor-sektor wisata
	Daya saing perdagangan dan industri	Peningkatan produktivitas serta kualitas produk industri
	Kinerja penanaman modal	Penciptaan iklim investasi yang kondusif

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Analisis Gap. Analisis gap pada kajian ini dilakukan dengan menyandingkan antara penelitian dan pengembangan 2016-2021 dengan rencana pembangunan 2021-2026. Analisis gap ini bertujuan untuk mencari kesenjangan yang terjadi pada setiap sasaran rencana pembangunan tahun 2021-2026 yang belum terdapat kegiatan kelitbangan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut.

Hasil dari analisis gap ini menunjukkan jumlah data yang didapatkan terkait dengan kelitbangan bidang ekonomi yang terlaksana tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan indikator sasaran 2021-2026. Analisis gap yang dilakukan mengelompokkan 198 data kelitbangan bidang ekonomi ke dalam 7 indikator sasaran yang telah tersusun. Hasil analisis gap dapat dilihat pada Tabel 3.

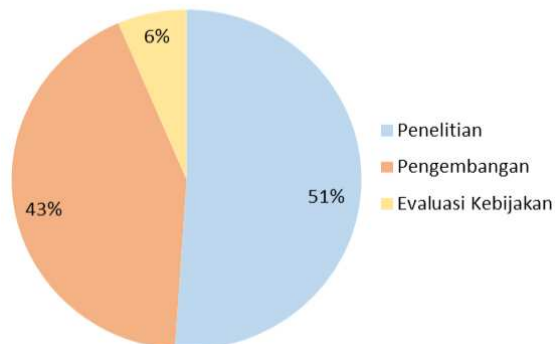
Tabel 3. Analisis Gap

Sasaran	Indikator Sasaran	Hasil Analisis Gap
Sasaran 1 Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai ekspor	Terlaksana 41 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
	Persentase peningkatan kunjungan wisata	Terlaksana 38 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
	Jumlah sentra produk unggulan daerah	Terlaksana 14 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
Sasaran 2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Nilai investasi	Terlaksana 23 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
	PDRB per kapita berlaku	Terlaksana 41 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Terlaksana 31 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan
	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Terlaksana 10 kegiatan kelitbangan yang mendukung, membutuhkan usulan pada setiap jenis kelitbangan

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Analisis Kebutuhan dan Prioritas Kelitbangan. Analisis kebutuhan kegiatan kelitbangan tahun 2021-2026 dilakukan dengan *need assessment* pada masing-masing bidang urusan pemerintahan terkait ekonomi. Usulan tema dirumuskan berdasarkan capaian dan permasalahan

yang telah dirumuskan pada Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) 2020 dan RA-RPJMD Kota Semarang 2021-2026 serta disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator sasaran rencana pembangunan Kota Semarang tahun 2021-2026. Selain itu juga memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas program pembangunan yang tercantum dalam RA-RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Persentase jenis kebutuhan kelitbangan dapat dilihat pada Gambar 5.



(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Gambar 5. Persentase Kebutuhan Kelitbangan 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan penelitian, terdapat 49 kegiatan kelitbangan bidang ekonomi di Kota Semarang yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh OPD Kota Semarang di tahun 2021-2026. Usulan tersebut juga diidentifikasi jenis kegiatannya yaitu jenis kegiatan penelitian, pengembangan, maupun evaluasi kebijakan. Seluruh usulan tersebut kemudian melalui analisis prioritas untuk menentukan tingkat kepentingan untuk dilaksanakan terlebih dahulu pada tahapan pelaksanaan selama tahun 2021-2026. Penentuan prioritas pelaksanaan ini dilakukan dengan menyesuaikan pentahapan pelaksanaan program prioritas bidang ekonomi pada RA-RPJMD 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kelitbangan yang dilakukan dapat secara efektif mendukung pelaksanaan program prioritas bidang ekonomi pada periode pembangunan 2021-2026. Prioritas pelaksanaan kelitbangan selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Prioritas

Prioritas	Jumlah Kegiatan
Prioritas 1	25 kegiatan
Prioritas 2	12 kegiatan
Prioritas 3	5 kegiatan
Prioritas 4	5 kegiatan
Prioritas 5	2 kegiatan

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Roadmap Kelitbangan. Usulan tema kelitbangan Kota Semarang tahun 2021-2026 telah diprioritaskan berdasarkan tingkat prioritas program yang telah ditetapkan pada RA-RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 dan tingkat permasalahan yang ada pada bidang ekonomi. Selanjutnya, pentahapan pelaksanaan tema kegiatan kelitbangan disertai dengan OPD penanggung jawab pelaksanaan. Rincian penentuan *roadmap* kelitbangan yaitu:

Penentuan Tahun Pelaksanaan Kelitbangan

- Hasil prioritisasi usulan kelitbangan, prioritas I dilaksanakan pada tahun pertama, dan seterusnya.
- Melihat kemampuan anggaran untuk kegiatan kelitbangan.

Penentuan Pelaksana/ Penanggung jawab

- Melihat kesesuaian tema/ topik usulan tema kelitbangan Kota Semarang tahun 2021-2026 dengan tugas, peran, dan fungsi masing-masing OPD/ instansi.

Penentuan Arah Bentuk Kegiatan Kelitbangan

- Dapat berupa 4 tipe swakelola (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) maupun hibah terbuka atau kompetitif.

Roadmap kelitbangan bidang ekonomi tahun Kelitbangan 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.

KESIMPULAN

Arahan kegiatan kelitbangan dibutuhkan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja pembangunan ekonomi. Penyusunan usulan judul tema kelitbangan perlu memerhatikan capaian dan permasalahan, isu strategis, serta prioritas program yang mendukung tiap sasaran rencana pembangunan. Hal ini berkaitan dengan upaya agar tema kelitbangan yang diusulkan tepat sasaran dalam pencapaian indikator kinerja dalam misi bidang ekonomi. Melalui identifikasi gambaran arah pembangunan, pembangunan bidang ekonomi di Kota Semarang memiliki prioritas dalam pengembangan potensi ekonomi kreatif serta peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM dan peningkatan daya saing kota. Dalam upaya pencapaian indikator-indikator sasaran dalam misi pembangunan bidang ekonomi, kajian kelitbangan ini menghasilkan 49 usulan tema kelitbangan dengan jenis kegiatan berupa penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Adanya kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi ini diharapkan dapat menjadi dasar atau input bagi perumusan kebijakan, rencana, serta penyelesaian masalah pembangunan di masa

mendatang supaya lebih efektif dan efisien serta lebih integratif dan komprehensif.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kelitbangan Kota Semarang di antaranya yaitu perlunya koordinasi antara Litbang Bappeda Kota Semarang dengan OPD lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Keterlibatan dan kontribusi aktif setiap OPD diperlukan dalam hal pencapaian indikator kinerja dan program prioritas untuk masing-masing urusan bidang pemerintahan. Selain

itu, dibutuhkan pula penyediaan dan sinkronisasi data hasil kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD di setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen penelitian dan pengembangan juga dapat dipublikasikan rutin pada situs web milik Pemerintah Kota Semarang. Selain untuk kepentingan bagi OPD dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan, namun juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, dan lembaga lainnya.

Tabel 5. Roadmap Kelitbangan 2021-2026

L/B/E	Usulan Tema Kelitbangan	Penanggung Jawab	Tahun ke-	Bentuk Pelaksanaan
Sasaran I: Meningkatnya produk unggulan daerah				
L	Studi skema permodalan atau alternatif pembiayaan UMKM atau inovasi produk/ jasa keuangan untuk UMKM	Bappeda, Dinkop dan UKM	1	Swakelola
E	Evaluasi kebijakan Gerai KOPIMI (Gerakan Masyarakat Terintegrasi Koperasi dan Usaha Mikro)	Dinkop dan UKM	5	Swakelola
B	Pengembangan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	Dinkop dan UKM	2	Swakelola
L	Kajian strategi <i>digital marketing</i> UMKM Kota Semarang	Bappeda, Dinkop dan UKM	1	Swakelola
B	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Dinkop dan UKM	3	Swakelola
L	Kajian sinergi dan kolaborasi Koperasi dan UKM (KUKM)	Dinkop dan UKM	2	Swakelola
B	Pengembangan <i>creative hub</i>	Disbudpar	2	Swakelola
L	Kajian strategi pengembangan MICE	Bappeda	2	Hibah/ Swakelola
L	Kajian subsektor ekonomi kreatif unggulan	Bappeda	2	Hibah/ Swakelola
L	Strategi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Disbudpar	1	Swakelola
B	Pengembangan Kampung Tematik Kreatif	Bappeda		Swakelola
L	Penyusunan FS dan DED <i>Semarang Creative Makerspace</i>	Dinas Perindustrian	1	Hibah/ Swakelola
L	Kajian Pengembangan <i>Sportourism</i>	Disbudpar	2	Hibah/ Swakelola
B	Pengembangan inisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha	Disbudpar	1	Swakelola
L	Kajian Strategi Kolaborasi Kawasan <i>Hinterland</i> dalam Promosi Wisata Lokal	Disbudpar, Bappeda	1	Swakelola
L	Kajian Operasional <i>Amphibi Bus</i>	Disbudpar	4	Swakelola
B	Pengembangan <i>startup</i> lokal	Dinkop dan UKM, Dinas Perindustrian, Disbudpar	2	Swakelola
L	Kajian pengembangan sentra-sentra produk unggulan daerah (kawasan - komoditas)	Bappeda	5	Swakelola
B	Pengembangan kawasan empon-empon	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	2	Swakelola
B	Promosi Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	1	Swakelola
L	Pengembangan desain konsep pembangunan <i>Microlibrary</i> UMKM	Dinkop dan UKM	3	Hibah/ Swakelola
B	Pengembangan PIRT	Dinkop dan UKM	2	Swakelola
B	Peningkatan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2	Swakelola

L/B/E	Usulan Tema Kelitbangan	Penanggung Jawab	Tahun ke-	Bentuk Pelaksanaan
Misi 2: Meningkatkan nilai tambah ekonomi				
B	Pengembangan penyediaan informasi terpadu investasi Kota Semarang	DPMPTSP	2	Swakelola
B	Pengembangan penataan sistem pelayanan investasi	DPMPTSP	2	Swakelola
L	Kajian penciptaan iklim investasi yang kondusif	DPMPTSP, Bappeda	1	Hibah/ Swakelola
B	Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Dinas Perikanan	1	Swakelola
L	FS dan DED pembangunan TPI	Dinas Perikanan	1	Swakelola
L	Kajian Perikanan Perkotaan	Dinas Perikanan	1	Swakelola
L	Kajian penataan pengelolaan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan)	Dinas Perikanan, Bappeda	1	Swakelola
B	Pengembangan fasilitas pemasaran ikan segar dan ikan olahan secara <i>online</i>	Dinas Perikanan	2	Swakelola
E	Evaluasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Dinas Pertanian	1	Swakelola
B	Pengembangan fasilitas penggunaan benih unggul bersertifikat	Dinas Pertanian	1	Swakelola
B	Pengembangan pendampingan dan pembinaan manajerial kepada kelompok-kelompok tani	Dinas Pertanian	2	Swakelola
B	Pengembangan peningkatan kualitas jaringan irigasi dan optimalisasi sumber-sumber air	Dinas Pertanian	1	Swakelola
B	Pengembangan pemberdayaan warga untuk pertanian perkotaan	Dinas Pertanian	1	Swakelola
L	Penyusunan <i>Masterplan</i> Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung <i>Blue Economy</i> di Kota Semarang	Dinas Perikanan, Bappeda	4	Hibah
L	Penyusunan <i>Roadmap</i> Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	Dinas Perikanan, Bappeda	1	Hibah
L	Kajian instrumen-instrumen pemulihan daya saing sektor perdagangan	Dinas Perdagangan	1	Swakelola
L	Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung usaha kecil dan menengah	Bappeda	1	Swakelola
E	Perumusan kebijakan terkait penertiban hak pakai kios dan los yang menyangkut tentang hak serta kewajiban pedagang	Dinas Perdagangan	1	Swakelola
L	Penyusunan DED Sentra PKL	Dinas Perdagangan	1	Swakelola
L	Kajian Operasional Sentra PKL	Dinas Perdagangan	2	Swakelola
L	Strategi pemasaran <i>online</i> sektor perdagangan dan jasa	Dinas Perdagangan	1	Swakelola
L	Pengembangan <i>Link and Match</i> UKM dengan swalayan/ mall	Dinkop dan UKM, Dinas perindustrian	3	Swakelola
B	Pengembangan Klinik HAKI	Dinkop dan UKM, Dinas Perindustrian, Disbudpar	3	Swakelola
B	Pengembangan Semarang Online Sale	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinkop UKM	1	Swakelola
L	Studi penguatan daya saing IKM	Dinas Perindustrian	5	Hibah/ Swakelola
B	Pengembangan fasilitas legalitas proses produksi, standarisasi produk dan usaha	Dinas Perindustrian	1	Swakelola

Keterangan: L = Penelitian; B = Pengembangan; dan E = Evaluasi Kebijakan

Sumber: Tim Peneliti, 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Semarang. (2016). *Kajian Strategis Kelitbangan 2016-2021*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2020). *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016-2020*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang tahun 2021-2026*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Blakely, Edward J.; Bradshaw, T. K. (2002). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice 3rd Edition*. SAGE Publications.
- Borsekova, K., Vitálišová, K., & Anna, V. (2012). The methodology of use and building competitive advantage on the regional level. *JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES*, 2, 41–50.
[https://doi.org/10.9770/jssi/2012.2.1\(4\)](https://doi.org/10.9770/jssi/2012.2.1(4))
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- ILO. (2005). *Pembangunan Ekonomi Lokal dalam Situasi Pasca Krisis*. ILO.
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2, 120–131.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824>
- Kwon, S., Kim, J., & Oh, D.-S. (2012). Measurement of Urban Competitiveness Based on Innovation Indicators in Six Metropolitan Cities in Korea. *World Technopolis Review*, 1. <https://doi.org/10.7165/wtr2012.1.3.177>
- Lestariningsih, E., Maharani, K., & Lestari, T. (2019). Measuring creative economy in Indonesia: Issues and challenges in data collection. *Asia-Pacific Sustainable Development Journal*, 2018, 99–117. <https://doi.org/10.18356/16fa938f-en>
- Nijkamp, P., & Abreu, M. (2009). Regional Development Theory. In R. Kitchin & N. B. T.-I. E. of H. G. Thrift (Eds.) (pp. 202–207). Oxford: Elsevier.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00869-5>
- OECD. (1996). *The Knowledge-Based Economy*. OECD Publishing.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sutcliffe, S. and Court, J. (2005). *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What Relevance for Developing Countries?* Overseas Development Institute.
- Tarigan, R. (2009). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UK Government. (2021). *UK Research and Development Roadmap*. London.